

Determinan *Financial Distress* Pemerintah Daerah

Fibrian Cahyo Pranoto¹, Handoko Arwi Hasthoro¹, Nurwiyanta²

¹ Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra Yogyakarta

² Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra Yogyakarta
Email: handoko_arwi@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the level of local government financial distress in Central Java. This research data is quantitative using secondary data in the form of budget realization reports taken from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance and the Central Statistics Agency (BPS) of Central Java Province. The sample used was 29 district governments and 6 city governments in Central Java province from 2015 to 2020. The sampling technique used was judgment sampling. Judgment Sampling is a form of convenience sampling in which population elements are selected based on the judgment of the researcher. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version 25 application program. The results show that financial independence has a negative effect on local government financial distress, the degree of fiscal decentralization has a negative effect on local government financial distress, and population has a positive effect on the financial distress of the local government.

Keywords: Financial Distress; Fiscal Decentralization; Local Autonomy; Local Government; Regional Independence

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat financial distress pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang diambil dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang digunakan sebanyak 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah *judgement sampling*. *Judgement Sampling* adalah bentuk sampling *convenience* yang didalamnya elemen populasi dipilih berdasarkan *judgement* peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah, derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah, jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal; Financial Distress; Kemandirian Daerah; Otonomi Daerah; Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Jones & Pledebury [1] menjelaskan sifat dari organisasi sektor publik adalah organisasi nirlaba, dimana tujuannya adalah memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pencapaian kinerja pemerintah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, artinya kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat dengan mengoptimalkan alokasi belanja modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi [2]. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan adanya reformasi setelah tahun 1998 di Indonesia yaitu perubahan bentuk tata kelola pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur desentralisasi sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat [3]. Tetapi, adanya otonomi daerah bukan jaminan

urusan keuangan daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kinerjanya dengan cara menerapkan *good public governance* [4].

Faktor yang diperkirakan mempengaruhi *financial distress* Pemerintah Daerah adalah kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasinya. Suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah satu cirinya terletak pada kemandirian keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah [5]. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan Tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat, begitupun sebaliknya semakin rendah kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula ketergantungan daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian seknas Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) didapatkan bahwa kecenderungan belanja modal terhadap belanja daerah kabupaten/kota masih di bawah ketentuan regulasi belanja modal yang disyaratkan. Belanja modal yang rendah akan berdampak pada rendahnya pembangunan infrastruktur membuat pelayanan menjadi tidak memadai sehingga Pemerintah Daerah berpotensi untuk mengalami *financial distress* [6]. Masalah lain bisa jadi kurangnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terutama di wilayah Indonesia Timur [7]. Menurut Syurmita [8] *Financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga Pemerintah Daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi. Jika keadaan tersebut terus berlanjut maka akan mengakibatkan Pemerintah Daerah mengalami *financial distress* sehingga tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat akibatnya tujuan pemerintah akan sulit dicapai. *Financial distress* pada sektor publik adalah ketidakmampuan untuk memberikan layanan pada tingkat yang telah ditetapkan atau sudah ada sebelumnya [9].

Kloha et. al. [10] menekankan hal yang menyebabkan kondisi *financial distress* yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan penurunan ekonomi khususnya ketika beberapa tanggung jawab dialihkan dari pusat ke kabupaten atau kota. Penelitian terkait *financial distress* di sektor publik terutama pada bidang pemerintahan penting untuk dilakukan karena kalau pemerintah mengalami kondisi *financial distress* akan berdampak nyata terhadap pelayanan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat sehingga akan terjadi stagnasi dalam taraf kesejahteraan masyarakat, selain hal tersebut juga akan berdampak padapertumbuhan perekonomian daerah karena tidak didukung oleh pelayanan publik yang memadai [2].

Indikasi terjadinya *financial distress* Pemerintah Daerah adalah derajat desentralisasi yang menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati ketergantungan daerah terhadap alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih sangat

tinggi. Secara rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 hanya berkisar 18,5%. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketergantungan fiskal yang masih tinggi terjadi pada Pemerintah Daerah kabupaten dan kota. Padahal, tingkat kota dan kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah [11].

Hasil penelitian yang terkait antara derajat desentralisasi dengan *financial distress* yang dilakukan oleh Sari & Arza [2] dan Zakia & Setiawan [12] menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syurmita [8] yang menunjukkan hasil bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Illahi et. al. [6] yang menunjukkan hasil bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Parmar, Freeman dan Harisson [13] mendefinisikan Stakeholder merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk merencanakan suatu metode yang digunakan untuk mengelola berbagai organisasi dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis [14]. Teori Stakeholder menyebutkan ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, dimana masyarakat sebagai Stakeholder utama ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah, sedangkan pemerintah sebagai stakeholder kunci dalam membuat kebijakan hanya mengalokasikan belanja modal yang rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sebagian besar Pemerintah Daerah hampir 70% bahkan ada yang 80% anggaran dialokasikan untuk belanja operasional atau belanja rutin. Perilaku boros Pemerintah Daerah yang mengurus separuh lebih anggarannya hanya untuk belanja pegawai dikhawatirkan akan mengantarkan Pemerintah Daerah pada kondisi kebangkrutan [15]. Keadaan ini memberikan indikasi tidak terpenuhinya tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat berupa tidak tersedianya dana untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur.

Otonomi daerah memberi kewenangan kepada

Pemerintah Daerah secara lebih luas untuk mengatur sendiri daerahnya. Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota harus mampu menciptakan inovasi dan kreasi dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 [11] dijelaskan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dalam pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 [11] terbagi menjadi tiga yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Financial distress merupakan istilah yang biasa digunakan pada perusahaan ketika terjadi kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan pada perusahaan ini umumnya ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, kegagalan perusahaan dalam membayar dividen, kekurangan modal kerja dan tidak cukupnya dana untuk membayarsebagianbiaya-biaya perusahaan. Apabila kondisi kesulitan keuangan perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban dan biaya-biaya perusahaan tidak segera ditindaklanjuti, maka kondisi tersebut akan semakin parah hingga berujung kebangkrutan [12].

Jones & Walker [9] mendefinisikan *financial distress* pada sektor publik diartikan sebagai ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah adalah alokasi belanja modal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, bahwa porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seknas ForumIndonesia untuk Transparansi (FITRA), didapatkan bahwa tren belanjamodal terhadap belanja daerah kabupaten/kota masih di bawah ketentuan regulasi belanja modal yang disyaratkan. Belanja modal yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya pembangunan infrastruktur dan perawatan infrastruktur yang membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak memadai sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerahberpotensi untuk mengalami *financial distress*.

Menurut Syurmita [8] bahwa pada Pemerintah Daerah, *financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja operasional atau belanja rutin, sehingga Pemerintah Daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi. Menurut Trussel & Patrick [16] *financial distress* pada Pemerintah Daerah mengancam kemampuan Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat dan mempertahankan fungsi-fungsi publik yang penting. Jadi, *financial distress* dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah tidak mengoptimalkan alokasi belanja modal dalam membangun infrastruktur publik sehingga akan berdampak pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka hal tersebut yang menyebabkan pemerintah mengalami kondisi *financial distress*.

Jones & Walker [9] meneliti tentang *financial distress* pada pemerintah lokal di negara bagian Australia (New South Wales). Informasi mengenai biaya pembangunan infrastruktur digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi untuk tingkat *financial distress*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 161 Pemerintah dalam rentang waktu 2001 dan 2002. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tingkat *financial distress* di pemerintah lokal berpengaruh secara positif terkait dengan ukuran populasi yang mereka layani, ukuran luas wilayah dan komposisi pendapatan mereka.

Pengembangan Hipotesis

Kemandirian keuangan adalah kemampuan atau kontribusi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerahnya [5]. Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam mengelola sumberdaya yang dihasilkan daerahnya untuk digunakan dalam pembangunan daerah serta mampu membiayai setiap kegiatan yang dilakukannya, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Semakin tinggi kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga probabilitas mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian

keuangannya rendah [6].

Sesuai dengan pandangan teori ketergantungan sumber daya bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan akan memiliki kekuatan untuk survive dan terhindar dari *financial distress*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syurmita [8] bahwa kemandirian keuangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi yang tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, cenderung memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran diluar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami *financial distress*. Berdasarkan uraian singkat diatas, maka pernyataan hipotesis yang bisa diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tingkat kekuatan pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk mengurus dan mengatur daerahnya, sehingga pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi dalam mengurus pemerintahannya dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak disamping dana transfer (perimbangan) dari pemerintah pusat dalam melakukan kebijakan desentralisasi, sehingga pemerintah dapat melakukan kebijakan yang lebih banyak dalam alokasi belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Arza [2] dan Zakia dan Setiawan [12] menunjukan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi cenderung tidak akan mengalami kondisi *financial distress* dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dan sesuai standar kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka pernyataan hipotesis yang bisa diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Derajat Desentralisasi Fiskal Berpengaruh Negatif terhadap *Financial Distress*.

Populasi atau jumlah penduduk dianggap sebagai ukuran pembayaran transfer pemerintah berkaitan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Jadi kota dengan populasi yang lebih besar diperkirakan akan menghasilkan

kinerja yang lebih baik karena lebih banyak sumber daya yang dipertaruhkan [4]. Dalam penelitian Zakia dan Setiawan [12] menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah Kabupaten/Kota, maka probabilitas mengalami *financial distress* akan semakin kecil dikarenakan populasi penduduk menggambarkan besaran transfer (sumber daya) yang dimiliki pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syurmita [8], Wulandari & Arza [17], dan Zakia dan Setiawan [12] menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, diketahui tidak akan mengalami *financial distress* karena jumlah penduduk yang besar menunjukkan kepemilikan sumber daya yang lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, maka pernyataan hipotesis yang bisa diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sampel yang digunakan adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan metode *judgement sampling*.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah Kemandirian keuangan adalah kontribusi atau kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam memenuhi kebutuhannya dalam upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerahnya [17].

Variabel independen kedua adalah derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam menyelenggarakan kebijakan desentralisasi. Menurut Illahi et.al. [6] Derajat desentralisasi fiskal menunjukan kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah seluas luasnya yang didukung oleh kesiapan keuangan daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat.

Variabel independen ketiga adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan proksi yang digunakan untuk ukuran Pemerintah Daerah [16]. Jumlah penduduk merupakan sejumlah manusia atau masyarakat yang bertempat tinggal atau menetap pada sebuah daerah, berkewajiban dalam memenuhi peraturan daerah tersebut serta, memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan publik agar memperoleh kesejahteraan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial distress*. *Financial distress* suatu daerah telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan porsi belanja modal minimal sebesar 30%.

Variabel *Financial Distress* Pemerintah Kabupaten/Kota diukur menggunakan rumus: $Financial\ Distress = 1 - (Belanja\ Modal / Total\ Belanja)$. Rasio *financial distress* yang semakin besar atau mendekati angka 1 menandakan semakin besarnya pengeluaran untuk belanja rutin (belanja operasi), sehingga Pemerintah Daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal atau belanja investasi karena pemerintah tidak memiliki kecukupan dana dalam pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan metode data sekunder dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Biro Pusat Statistik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda menggunakan formulasi atau rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 KK + \beta_2 DDF + \beta_3 JP + e \quad (1)$$

HASIL

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota dengan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi. Luas wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,70% dari luas Indonesia. Wilayah provinsi Jawa Tengah terdiri dari 922 ribu hektar (30,47%) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53%) bukan lahan sawah.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. dev
<i>Financial distress</i>	210	0.68	0.95	0.82	0.05
Derajat desentralisasi fiskal	210	0.08	0.46	0.17	0.06
Jumlah Penduduk	210	120	197	989	422
Valid N (listwise)	210				

Dua ratus sepuluh sampel yang diuji menunjukkan bahwa nilai terendah dari *financial distress* sebesar 0,6844 (68,44%) yaitu kabupaten Kudus pada tahun 2016 dan nilai tertingginya adalah 0,9571 (95,71%) yaitu kabupaten rembang pada tahun 2015, dengan nilai rata-rata variabel *financial distress* Pemerintah Daerah sebesar 0,827498 (82,74%) dan standar

deviasinya sebesar 0,0516840. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015- 2020 mengalami kondisi *financial distress* yang cukup tinggi yaitu dengan nilai sebesar 82,74%. Nilai rata-rata *financial distress* sebesar 82,74% menunjukkan bahwa alokasi rata-rata belanja modal kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah hanya berkisar 17,26% (100%-82,74%), artinya rata-rata alokasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah masih jauh dibawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu minimal sebesar 30%.

Asumsi Klasik

Pada pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp. Sig (2-tailed)*. Jika nilai signifikansi >0.05 maka data residual berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi <0.05 maka data residual berdistribusi tidak normal. Hasil pengujian normalitas dengan uji statistik non-parametrik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,096 dibandingkan dengan tingkat alpha 5% (0,05), sehingga data dinyatakan berdistribusi normal.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas di dalam model analisis regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Batas maksimal dari nilai VIF adalah 10 dan batas minimal *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 maka akan terjadi multikoloniaritas dan model regresi tidak layak untuk dipakai. Hasil pada uji multikolinieritas memiliki nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari variabel tersebut tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Suatu model regresi dikatakan homoskedastisitas yaitu jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, dan sebaliknya jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Glejser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas

apabila nilai signifikansinya $>0,05$. Sebaliknya, model regresi terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $<0,05$ [18]. Hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikansi di bawah $0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai signifikan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi fiskal, dan jumlah penduduk berturut-turut adalah 0.734 , 0.768 , 0.878 .

Model regresi yang baik harus terbebas dari autokorelasi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson (DW). Suatu observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin Watson (DW) terletak antara batas atas atau nilainya antara -2 sampai dengan $+2$. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) 1.267 terletak diantara -2 dan $+2$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat [18]. Hasil analisis regresi menunjukkan persamaan:

$$\text{Financial distress} = 0.868 - 0.022 \text{ KK} - 0.187 \text{ DDF} + 0,00000003688 \text{ JP}$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan hubungan pengaruh dari kemandirian keuangan (negatif), derajat desentralisasi fiskal (negatif), dan jumlah penduduk (positif) terhadap *financial distress*.

Nilai signifikansi variabel kemandirian keuangan adalah $0,006$ lebih kecil dari nilai α 5% ($p < 0,05$), serta memiliki nilai koefisien regresi dengan arah negatif yaitu $-0,022$, artinya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin rendah tingkat *financial distress* Pemerintah Daerah. Sehingga, hipotesis pertama dinyatakan diterima.

Nilai signifikansi variabel derajat desentralisasi fiskal menunjukkan nilai $0,038$ lebih kecil dari nilai α 5% ($p < 0,05$), serta memiliki nilai koefisien regresi dengan arah negatif yaitu $-0,187$, artinya semakin tinggi tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah maka semakin rendah tingkat *financial distress* Pemerintah Daerah. Maka, hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Nilai signifikansi variabel jumlah penduduk menunjukkan nilai $0,002$ lebih kecil dari nilai α 5% ($p < 0,05$), serta memiliki nilai koefisien regresi dengan arah positif yaitu $0,00000003688$, artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi tingkat *financial distress* Pemerintah Daerah. Sehingga, hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

Hasil penghitungan koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar $0,117$. Hal ini berarti bahwa $11,7\%$ variabel *financial distress* Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian keuangan, derajat desentralisasi fiskal, dan jumlah penduduk sedangkan sisanya sebesar $88,3\%$ dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model yang diteliti.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis pertama memiliki nilai signifikansi $0,006$ dan koefisien dengan arah negatif sebesar $-0,022$ yang artinya kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones & Walker [9] dan Syurmita [8] yang menyatakan kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Serta sejalan dengan pandangan teori ketergantungan sumber daya bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan akan memiliki kekuatan untuk survive dan terhindar dari *financial distress*. Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi yang tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, cenderung memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran di luar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami *financial distress*. Semakin tinggi kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga probabilitas mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah.

Hasil pengujian hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi $0,038$ dan koefisien dengan arah negatif sebesar $-0,187$ yang artinya derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Arza [2] dan Zakia dan Setiawan [12] yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi cenderung tidak akan mengalami kondisi *financial distress* dikarenakan Pemerintah Daerah memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dan sesuai standar kepada masyarakat.

Hasil pengujian hipotesis ketiga memiliki nilai

signifikansi 0,002 dan koefisien dengan arah positif sebesar 0,00000003688, yang artinya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syurmita [8], Wulandari dan Arza [17], dan Zakia dan Setiawan [12] yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa Jumlah penduduk yang besar membuat semakin banyaknya uang yang digunakan untuk belanja operasi seperti belanja pegawai yang digunakan untuk memenuhi tuntutan atau hak yang harus diterima masyarakat sehingga Pemerintah Daerah menekan biaya untuk belanja modal atau investasi yang digunakan untuk membangun infrastruktur publik [16]. Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Daerah tidak mampu menyediakan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan yang dilihat dari realisasi porsi belanja modal, sehingga dengan jumlah penduduk yang besar kemungkinan Pemerintah Daerah untuk mengalami *financial distress* akan meningkat.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan, derajat desentralisasi fiskal, jumlah penduduk, dan luas wilayah terhadap *financial distress* Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah. Hasil uji regresi linier berganda terhadap 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2015-2020.

Variabel kemandirian keuangan berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah karena Pemerintah Daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi yang tidak bergantung pada bantuan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta pinjaman, cenderung memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran diluar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami *financial distress*. Variabel derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah karena Pemerintah Daerah yang memiliki derajat desentralisasi yang tinggi memiliki banyak kewenangan dan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja modal untuk membangun infrastruktur pelayanan publik. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *financial distress* pada Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah, artinya semakin banyak jumlah penduduk maka *financial distress* Pemerintah Daerah cenderung meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Jones and M. Plendebury, *Public Sector Accounting*, Sixth Edition. Essex: Pearson Education Limited, 2010. [Online]. Available: www.pearsoned.co.uk.
- [2] M. Sari and F. I. Arza, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode," *Wahana Riset Akuntansi*, vol. 7, no. 1, pp. 1425–1436, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/issue/archive>
- [3] H. A. Hasthoro, Y. Saksono, and N. Widiyanti, "The Effect of Financial Conditions and Audit Opinions on Local Government Performance," 2021. doi: <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.018>.
- [4] H. A. Hasthoro and Sunardi, "Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 19, no. 1, pp. 53–68, 2016, doi: <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>.
- [5] U. Rinaldi, "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Jurnal EKSOS*, vol. 8, no. 2, pp. 105–113, 2012, Accessed: Jun. 22, 2022. [Online]. Available: http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06-eksos%204%20-%20udin%20rinaldi.pdf
- [6] F. Illahi, ; Rice, H. ; Dica, and Lady Silvera, "The Effect Of Financial Independence, Degree Of Decentralization And Shopping Harmony In Predicting The Status Of Financial Distress Of Regency And City Governments In West Sumatra Province 2015-2017," *Pareso Jurnal*, vol. 3, no. 3, pp. 543–556, 2021.
- [7] R. Ridwan, S. Sarwoko, N. Nurwiyanta, K. Kartinah, and Y. Saksono, "The Competitiveness of Regions in the Eastern Indonesia," 2019. doi: <https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.57>.
- [8] Syurmita, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Prediksi Financial Distress," 2014.
- [9] S. Jones and R. G. Walker, "Explanators of local government distress," *Abacus*, vol. 43, no. 3, pp. 396–418, Sep. 2007, doi: [10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x).
- [10] P. Kloha, C. S. Weissert, R. Kleine, and E. Lansing, "Developing and Testing a Composite Model 313," *Public Administration Review*, vol. 65, no. 3, pp. 313–320, 2005.
- [11] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang No 23 tahun 2014*. Indonesia, 2014.

- [12] R. Zakia and M. A. Setiawan, "Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 3, no. 3, pp. 653–671, 2021, doi: <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387>.
- [13] B. L. Parmar R Edward Freeman Jeffrey S Harrison and R. Edward, "Stakeholder Theory: The State of the Art," Cambridge, UK., 2010. [Online]. Available: <https://scholarship.richmond.edu/management-faculty-publications>
- [14] D. Rusdi and K. Fuad, "Metode Prediksi Financial Distress di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Untuk Mengukur Kesejahteraan Ummat," *Akuntansi Dewantara*, vol. 2, no. 1, pp. 13–24, 2018, doi: 10.29230/ad.v2i1.2008.
- [15] Y. Dwitayanti, R. Armaini, S. Aprianti, J. Akuntansi, and P. N. Sriwijaya, "Analisis Pengaruh Budgetary Solvency Ratio Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, vol. 4, no. 2, pp. 137–144, 2020.
- [16] J. M. Trussel and P. A. Patrick, "A predictive model of fiscal distress in local governments," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, vol. 21, no. 4, pp. 578–616, 2009, doi: 10.1108/JPBAFM-21-04-2009.
- [17] Y. Wulandari and F. I. Arza, "Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 2, no. 3, pp. 3179–3196, 2020, doi: <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.276>.
- [18] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 25*, 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.